



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DKP TERHADAP ALAT TANGKAP  
IKAN JENIS PUKAT HELA (TRAWLS) BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DESA HAJORAN  
KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Oleh:

**TAUFIQ IKHTIAR HAREFA**

**11527100032**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Kontrol Oleh Dkp Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapamuli Tengah"*

Nama : TAUFIQ IKHTIAR HAREFA  
 NIM : 11527100032  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

RONI KURNIAWAN, SH.,MH

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Judul, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah" yang ditulis oleh :

TAUFIQ IKHTIAR HAREFA

1527100032

Studi Ilmu Hukum

Disahkan pada :

Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019

Jam, 13.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 November 2019

TIM PENGUJI MUNAQASAH

*(Handwritten signatures and marks)*

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

**RONI KURNIAWAN, SH.,MH**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

: Kota Dinas

: Pengajuan Skripsi

Sr. TAUFIQ IKHTIAR HAREFA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan diperlukan, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara TAUFIQ IKHTIAR HAREFA, yang berjudul "Pelaksanaan Kontrol Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 26 Agustus 2019

Pembimbing

**RONI KURNIAWAN, SH.,MH**

NIK. 130217086

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Dalam rangka pelaksanaan kontrol oleh DKP terhadap alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) ini berdasarkan Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Desa Hajoran, maka Pelaksanaan Kontrol yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan harus diperhatikan dengan baik mengenai alat-alat tangkap ikan yang dilarang. Berdasarkan observasi penulis lapangan masih banyak kapal-kapal pukat hela (*trawls*) ini beroperasi dengan lancar. Kemudian menangkap ikan di wilayah tempat nelayan tradisional sering menangkap ikan dan merusak terumbu karang di tempat mereka menangkap ikan.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap kapal pukat hela (*trawls*), apakah larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pemberantasan terhadap kapal pukat hela (*trawls*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap kapal pukat hela (*trawls*), mengetahui larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pemberantasan terhadap kapal pukat hela (*trawls*).

Jenis penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis), sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kajian pustaka, dan angket.

Hasil penelitian pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP saat ini terhadap kapal pukat hela (*trawls*) itu dengan cara dilakukan patroli gabungan bersama TNI, Polairud, dan Kepolisian Kabupaten Tapanuli Tengah serta patroli yang dilakukan pada setiap harinya, itu kurang maksimal sehingga masih banyak kapal pukat hela (*trawls*) ini yang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian larangan terhadap kapal pukat hela (*trawls*) ini belum sesuai dengan Peraturan menteri Nomor 71 tahun 2016 yang melarang dengan tegas bahwasanya kapal pukat hela (*trawls*) ini tidak bisa beroperasi lagi di perairan kabupaten tapanuli tengah, dan dampak yang ditimbulkan jika kapal pukat hela (*trawls*) ini beroperasi adalah mengakibatkan penurunan terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional, tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat nelayan tradisional, dan merusak ekosistem bawah laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini serta sholawat dan salam selalu penulis curahkan kepada junjungan semesta alam Nabi besar Muhammad SAW dengan keindahan ajaran dan ilmu yang disebarkannya dengan *"Allahumma shali'ala sayyidina Muhammad, Wa'ala ali Sayyidina Muhammad"*.

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah"** merupakan judul karya ilmiah yang dicita-citakan oleh penulis untuk segera menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada penulis, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Datar Haklan Harefa dan Ibunda tercinta Salmaidar Sitanggang, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan moril dan materiil dan nasehat untuk selalu





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita sehingga sampai penulis dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) difakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian juga terima kasih untuk adik-adik serta keluarga besar yang berkontribusi besar terhadap penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag. MA. Selaku rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCI selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Bapak Firdaus SH., MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum selaku sekertaris jurusan yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Roni Kurniawan, SH.,MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi begitu besar kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Jumni Nelly, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
7. Sahabat serta teman-teman Ilmu Hukum, teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis, teman-teman KKN Desa Sungai Siput dan juga teman saya yang lainnya dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis

**Taufiq Ikhtiar Harefa**  
**NIM. 11527100032**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Keadaan Geografis Kabupaten Tapanuli Tengah .....	20
B. Gambaran Umum Desa Hajoran .....	24
C. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.....	27
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>32</b>
A. Kesejahteraan Sosial .....	32
B. Pengawasan .....	34
C. Peranan .....	42
D. Penegakan Hukum .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kontrol Yang Dilakukan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela ( <i>trawls</i> ) Di Desa Hajoran. ....	49
B. Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela ( <i>trawls</i> ) menurut Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesi .....	53
C. Dampak Yang Ditimbulkan Jika Tidak Dilakukan Pemberantasan Terhadap Kapal Pukat Hela ( <i>trawls</i> ) Bagi Nelayan Yang Ada Di Desa Hajoran.....	57

**BAB V PENUTUP.....69**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Populasi dan Sampel .....	15
Table 4.1	: Jawaban Responden Mengenai Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penetapan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia .....	59
Table 4.2	: Jawaban Responden Mengenai Perlindungan Hak-Hak Para Nelayan Tradisional Melalui Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016.....	59
Table 4.3	: Jawaban Responden Mengenai Banyaknya Kapal Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) Yang Beroperasi Di Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	61
Table 4.4	: Jawaban Responden Mengenai Kapal Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) Yang Sering Berpapasan Dengan Nelayan Tradisional.....	62
Table 4.5	: Jawaban Responden Mengenai Peningkatan Kapal Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) Yang Beroperasi.....	63
Table 4.6	: Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemberantasan Terhadap Kapal Pukat Hela ( <i>Trawls</i> )	64
Tabel 4.7	: Jawaban Responden Mengenai Hasil Tangkap Nelayan Jika Kapal Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) Ini Beroperasi.....	65
Table 4.8	: Jawaban Responden Mengenai Kerusakan Ekosistem Yang Diakibatkan Beroperasinya Kapal Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) .....	66
Table 4.9	: Jawaban Responden Mengenai Kapal Pukat Hela ( <i>Trawls</i> ) Ini Dihilangkan Dari Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah .....	68



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Pesisir Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi besar terhadap sumber daya perikanan tangkap dan budidaya laut. Disamping itu Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi ekosistem pesisir seperti terumbu karang, ekosistem mangrove dan padang lamun. Ekosistem pesisir memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan sumberdaya ikan. Secara ekologi bahwa fungsi ekosistem pesisir berfungsi sebagai daerah pemijahan hampir seluruh jenis ikan. Pentingnya ekosistem pesisir sering dimanfaatkan tanpa memandang kelestarian ekosistemnya. Kerusakan ekosistem pesisir pada umumnya diakibatkan oleh rendahnya sumberdaya manusia di sekitar pesisir. Belum optimalnya arah kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang sangat berlebihan.<sup>1</sup>

Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 Kecamatan, 140 Desa, 30 Kelurahan. Jumlah penduduk 354.145 jiwa yang terdiri dari 178.476 jiwa laki-laki dan 176.150 jiwa perempuan, adapun luas wilayah 6.149,98 Km<sup>2</sup>, darat 2.194,98 Km<sup>2</sup>, laut 4.000 Km<sup>2</sup>, ketinggian 0-1.266 meter diatas permukaan air laut, panjang garis pantai adalah ± 220 km serta pulau-pulau kecil.

<sup>1</sup> Proposal Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bantuan Alat Tangkap Bubu/Lukah TA. 2020, h. 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan primadona dalam meningkatkan perekonomian khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebanyak 41.660 ton, perikanan budidaya 557,79 ton dengan potensi yang tersedia untuk perikanan budidaya  $\pm$  12.257,58 Ha termasuk didalamnya danau, sungai dan payau. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa produksi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum maksimal dimanfaatkan bila dihubungkan dengan potensi yang ada.<sup>2</sup>

Secara umum potensi pengembangan Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi perikanan tangkap, pengembangan budidaya air laut dan budidaya air tawar yang sangat menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dengan luasnya zona penangkapan, kawasan pengembangan budidaya air laut dan budidaya air tawar yang belum dimanfaatkan dengan optimal yang artinya peluang pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik.

Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil sekitar wilayah kabupaten ini. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 Kecamatan meliputi Kecamatan Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, Barus, Barus Utara, Sosorgadong, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sorkam, Kolang, Tapan Nauli,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sitahuis, Pandan, Sarudik, Tukka, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun dan Sukabangun. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 12 Kecamatan merupakan wilayah pesisir. Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan sebanyak 60%.

Salah satunya di Desa Hajoran. Desa Hajoran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mayoritas penduduknya bertempat tinggal di pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayan. Desa Hajoran merupakan salah satu desa yang terkenal di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pengolah ikan hasil tangkapan yang cukup banyak. Desa Hajoran pada mulanya tidak begitu terkenal di Tapanuli Tengah karena belum terdapat kehidupan dan juga masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut masih sedikit. Namun, memasuki Tahun 1971 sejak kedatangan Etnis Bugis perlahan-lahan Desa Hajoran sudah mulai memiliki kehidupan.<sup>3</sup>

Pada Tahun 1983 masyarakat nelayan Desa Hajoran mulai mengolah hasil tangkapan mereka dan mengirim olahan mereka ke luar desa maupun kota. Dari hasil tangkapan masyarakat nelayan inilah yang membuat perekonomian mereka semakin meningkat. Dengan mulai di buatnya bagan pancang/bagan tancap, para masyarakat nelayan mulai menangkap ikan dengan menggunakan cara kerja berkelompok ataupun sendiri. Selain bagan pancang/bagan tancap, bagan bot juga di gunakan para masyarakat pendatang. Bagan bot ini di

<sup>3</sup>Ratu Langit, Tokoh Masyarakat Desa Hajoran, (wawancara), 14 Maret 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkenalkan ke Desa Hajoran sekitar Tahun 1982 yang di bawa oleh orang pendatang yang berasal dari Batahan, Mandailing Natal.<sup>4</sup>

Memasuki Tahun 1990 dengan seiring berjalannya waktu desa ini semakin terkenal dari hasil tangkapan dan olahan mereka. Sehingga pada tahun inilah desa tersebut di juluki sebagai “Desa Dollar”. Julukan ini di berikan oleh orang-orang yang berdatangan ke desa untuk membeli hasil tangkapan dan olahan mereka. Pada Tahun 1990 memang perekonomian di Desa Hajoran sangat meningkat secara drastis. Selain dari hasil tangkapan, olahan ikan yang mereka olah pun semakin banyak permintaan dari para konsumen. Sehingga putaran uang di tahun tersebut tidak pernah berhenti dalam sehari. Dalam sehari mereka para tauke yang rata-rata mempunyai langganan tetap mendapatkan keuntungan sebanyak ± Rp 5.000.000/ hari nya. Sehingga para anggota tauke mendapatkan bagian ataupun gaji dengan membawa hasil ke rumah sebanyak ± Rp 200.000/ hari.

Pada Tahun 2013 desa ini sudah mulai kesulitan dalam perekonomian. Hal ini terjadi karena alat tangkap pukat harimau atau pukat hela (*trawls*) sudah mulai masuk ke Desa Hajoran sehingga alat tangkap ini merusak ekosistem laut dan ikan. Dengan masuknya pukat harimau ke Desa Hajoran maka minimlah ekonomi atau pendapatan dari para masyarakat nelayan hingga saat ini. para tauke yang dulu banyak mempunyai bagan bot dan bagan pancang/bagan tancap sudah mulai bangkrut karena ekosistem di laut sudah mulai rusak. Sehingga para tauke mulai berhenti dalam menanagkap

<sup>4</sup> Makmun Limbong, Tokoh Masyarakat Desa Hajoran, (wawancara), 14 Maret 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengelola ikan dan berpindah profesi sebagai petani. Bahkan para etnis bugis yang awalnya memperkenalkan bagan pancang sudah banyak berpindah rumah ataupun tidak menetap di Desa Hajoran lagi karena banyak nya ekosistem laut yang sudah tidak dapat di manfaatkan oleh mereka lagi.

Pukat Hela (trawls) ini merupakan semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak sedangkan Kapal Pukat Hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela.<sup>5</sup> Dan penarikan jaring ini ditarik pada dasar / dekat dasar laut, dengan demikian ikan yang menjadi tujuan penangkapan ialah ikan-ikan dasar ataupun *demersal fish*. Termasuk juga di sini jenis-jenis udang dan kerang.<sup>6</sup> Otomatis bibit-bibit ikan pun akan masuk kedalam jaring tersebut dan terumbu karangnya rusak akibat jaring yang ditarik kapal pukat hela.

Di Indonesia dengan tegas dilarang penggunaan alat penangkapan ikan ini yang tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan dalam ayat (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat

<sup>5</sup> Permen Kelautan dan Perikanan nomor PER.06/MEN/2008 dan bentuk baku konstruksi pukat hela arad SNI-01-7233-2006 BSN.-<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/09/>

<sup>6</sup> H. Sudirman dan Achmar Mallawa, *Teknik Penangkapan Ikan*, (Jakarta:Rineka Cipta,2012) h.108



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia<sup>7</sup>. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, dan sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, untuk menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Oleh karena itu, alat penangkapan ikan ini menjadi perhatian sangat penting. Dalam Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan<sup>8</sup>. Dalam kaitannya dengan penggunaan alat tangkap terlarang ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengambil langkah strategis melalui Peraturan Menteri ini guna mengatasi ancaman kerusakan ekosistem laut nasional.

Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai pihak yang sangat disoroti dalam hal ini harus menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana kita ketahui, untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pada Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang kelautan dan perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, evaluasi dan pengendalian<sup>10</sup>. Oleh karena itu, peran DKP dalam hal ini sangat di butuhkan sebagai pihak yang berwenang dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang timbul di wilayah perairan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada pasal 21 Ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan:

Alat Penangkapan Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:

<sup>9</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya -Ed. Revisi-6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.31

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pukat Tarik (*Seine Nets*), yang meliputi dogol (*Danish seines*), cantrang, dan lampara dasar,
- b. Pukat Hela (*Trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*).
- c. Perangkap, yang meliputi perangkap ikan loncat (*Aeriak traps*) dan *Muro ami*.

Dengan di keluarkannya peraturan menteri tersebut artinya seluruh kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine*) di larang dan tidak di perbolehkan lagi beroperasi.

Para pengusaha kapal atau dalam hal ini diartikan sebagai pemegang kuasa untuk menjalankan/mengoperasikan kapal dari pemilik modal<sup>11</sup> tidak merespon dengan adanya peraturan menteri tersebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan masih ada kapal-kapal yang beroperasi secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemerintah. Seperti di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ini ada 10 unit kapal yang menggunakan alat panangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) ini.

Nelayan Desa Hajoran sendiri sangat tidak terima dengan kegiatan operasi yang dilakukan oleh kapal pukat hela (*trawls*) ini sebab keberadaannya mengganggu dan mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan tradisional di desa hajoran. berdasarkan wawancara dengan Bapak Heri salah seorang nelayan yang ada di desa hajoran beliau menjelaskan bahwa keberadaan pukat

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.78

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hela (*trawls*) menurunkan pendapatan hasil nelayan yang biasanya 150 kg perhari menjadi 80 kg perhari dikarenakan keberadaan kapal pukat hela (*trawl*) yang masih beroperasi di perairan desa hajoran<sup>12</sup>. dengan adanya peraturan menteri ini maka masyarakat mengharapkan DKP dari pihak pemerintah dapat tegas dan memberantas habis kapal pukat hela (*Trawls*) ini. karena kebanyakan masyarakat di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah kehidupannya itu sangat bergantung kepada hasil laut dan beprofesi sebagai nelayan.

Dari gambaran diatas, melihat masih banyaknya kapal penangkap ikan jenis pukat hela (*Trawls*) ini masih beroperasi di perairan Kabupaten Tapanuli Tengah serta keberadaannya menjadi masalah bagi masyarakat yang beprofesi sebagai nelayan tradisional di Desa Hajoran. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti judul tentang **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dkp Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.**

<sup>12</sup> Heri, Nelayan Tradisional Desa Hajoran, (Wawancara), 12 Maret 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Untuk mendapat penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang penelitian ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Pelaksanaan Kontrol oleh DKP terhadap penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (*trawls*), larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawls*) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 dan dampak yang ditimbulkan akibat dari beroperasinya Kapal Pukat Hela (*Trawls*) bagi nelayan yang ada di Desa Hajoran.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah di uraikan di bagian latar belakang maka adapun rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*Trawls*) di desa hajoran?
2. Apakah larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pemberantasan terhadap Kapal Pukat Hela (*Trawls*) bagi nelayan yang ada di Desa Hajoran?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*Trawls*) ini di desa hajoran.
- b. Untuk mengetahui larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- c. Untuk Mengetahui Dampak yang ditimbulkan akibat dari beroperasinya Kapal Pukat Hela bagi nelayan yang ada di Desa Hajoran

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademisi lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>13</sup>. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>14</sup>

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta , 2016), h. 2

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), hal. 24

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada narasumber. Untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara suatu masalah yang terjadi dengan teori atau undang-undang yang berlaku.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis yang dilakukan di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun alasannya adalah disamping penulis berasal dari desa Hajoran, penulis juga mendapatkan adanya permasalahan yang terjadi yangmana pemerintah kurang dalam mengatasi masalah Penggunaan Alat Tangkap Jenis Pukat Hela (*Trawls Net*) yang masih beroperasi di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Padahal melalui Peraturan menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah diatur penggunaan alat tangkap Kapal Pukat Hela (*Trawls Net*) ini dan sudah dilarang tidak boleh beroperasi lagi.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Bidang UPT Labuan Angin, Kasi Penangkapan dan Perizinan, Staff K. UPT Labuan Angin, Kepala Desa Hajoran, dan Nelayan yang ada di Desa Hajoran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh DKP terhadap penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*Trawls*) di desa hajoran, larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016, dan dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pemberantasan terhadap Kapal Pukat Hela (*Trawls*) bagi nelayan yang ada di Desa Hajoran.

#### 4. Populasi dan sampel

Populasi (*universe*) adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama<sup>16</sup>.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah tehnik pengambilan sampel yang digunakan dengan cara pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>18</sup>. Alasan mengambil *Purposive Sampling* karena penulis hanya memilih kriteria sampel yang berhubungan dengan penelitian penulis. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1.1.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 95.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) ,h. 98

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *loc.cit.* h. 106

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Dinas Kelautan dan Perairan	23	5	22%
2	Nelayan Desa Hajoran	166	31	19%
<b>Jumlah</b>		<b>189</b>	<b>36</b>	<b>19%</b>

Sumber: Data Primer penelitian tahun 2019

### 5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>19</sup> baik dengan metode pengamatan (*Observasi*) ataupun wawancara (*Interview*) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Desa Hajoran, dan Nelayan yang ada di Desa Hajoran.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perundang-undangan.<sup>20</sup> Bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, h. 30

<sup>20</sup> Zainuddin Ali., *Op.cit*, h. 106

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, <sup>2010</sup>), h. 156

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, *leaflet*, dan berita internet.<sup>22</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.<sup>23</sup>

**6. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

## a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam artian bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan pancaindra<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>24</sup> H.M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif “Kominikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta:Kencana, 2011),Ed.Ke-2,Cet.Ke-6, h.144

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Disamping pengamatan (*observation*), penulis juga menggunakan metode wawancara (*interview*) yang dilakukan secara sistematis dan runtun serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.<sup>25</sup>

#### c. Angket

Angket merupakan suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.

#### d. Kajian Pustaka

Yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### 7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data kualitatif, yang merupakan cara menghasilkan penelitian deskriptif yaitu segala hal yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan serta mengamati perilaku subjek yang diteliti.<sup>26</sup> Dengan analisa data kualitatif ini penulis terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, penulis harus menganalisa sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

<sup>25</sup> Amiruddin, Zainal Asikin., *Op.cit*, h.82

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penulis mengambil suatu kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat Umum.<sup>27</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat uraian tentang: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASAI PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat mengenai gambaran umum tentang sejarah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, Struktur organisasi, Tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan membahas tentang Tinjauan Teori

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat hasil penelitian tentang:

<sup>27</sup> Aslim Arsyad, Metode ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti, (Pekanbaru: UNRI Press, 2005), h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan kontrol oleh DKP terhadap penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*Trawls*) ini di desa hajoran.
2. Bagaimana larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari beroperasinya Kapal Pukat Hela (*trawls*) ini bagi nelayan yang ada di Desa Hajoran.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan di paparkan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Keadaan Geografis Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten di pesisir pantai barat Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi besar terhadap sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya laut. Disamping itu Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi ekosistem pesisir seperti terumbu karang, ekosistem mangrove dan padang lamun. Ekosistem pesisir memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan sumberdaya ikan. Secara ekologi bahwa fungsi ekosistem pesisir berfungsi sebagai daerah pemijahan hampir seluruh jenis ikan. Pentingnya ekosistem pesisir sering dimanfaatkan tanpa memandang kelestarian ekosistemnya. Kerusakan ekosistem pesisir pada umumnya diakibatkan oleh rendahnya sumberdaya manusia disekitar pesisir. Belum optimalnya arah kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan eksploitasi sumberdaya alam yang sangat berlebihan.

Secara geografis Kabupaten Tapanuli Tengah terletak pada  $01^{\circ}11'00''$  -  $2^{\circ}22'0''$  LU dan  $98^{\circ}07'$  -  $98^{\circ}12'$  BT dimana sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Barat, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, Kepulauan Nias dan Kota Sibolga sebelah utara dengan Aceh Singkil dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelah selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Kota Pandan merupakan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 Kecamatan, 140 Desa, 30 Kelurahan. Jumlah Penduduk 354.145 jiwa yang terdiri dari 178.476 jiwa laki-laki dan 176.150 jiwa perempuan, adapun luas wilayah 6.194,98 Km<sup>2</sup>, darat 2.194,98 Km<sup>2</sup>, Laut 4.000 Km<sup>2</sup>, Ketinggian 0-1.266 meter diatas permukaan air laut, panjang garis pantai adalah ± 220 Km serta memiliki 30 pulau-pulau kecil.

Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil sekitar wilayah kabupaten ini. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 Kecamatan meliputi Kecamatan Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, Barus, Barus Utara, Sosorgadong, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, Pandan, Sarudik, Tukka, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun dan Sukabangun. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 12 Kecamatan merupakan wilayah pesisir. Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan sebanyak 60%.

Potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan primadona dalam meningkatkan perekonomian khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebanyak 41.660 ton, perikanan budidaya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

557,79 ton dengan potensi yang tersedia untuk perikanan budidaya  $\pm$  12.257,58 Ha termasuk didalamnya danau, sungai dan payau. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa produksi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum maksimal dimanfaatkan bila dihubungkan dengan potensi yang ada.

Kabupaten Tapanuli Tengah pada posisi wilayahnya yang strategis berada di kawasan pantai barat Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya ikan yang komersial, dimana Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 30 pulau-pulau termasuk pulau kecil dan pulau-pulau besar yang tersebar di perairan Kabupaten Tapanuli Tengah dan berada di WPP 572 dengan potensi sebesar  $\pm$  565.300 ton/tahun.

Secara umum potensi pengembangan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi perikanan tangkap, pengembangan budidaya air laut dan budidaya air tawar yang sangat menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dengan luasnya zona penangkapan, kawasan pengembangan budidaya air laut dan budidaya air tawar yang belum dimanfaatkan dengan optimal yang artinya peluang pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik.

### 1. Produksi dan Potensi Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2018 sebanyak 41.660 ton/Tahun, perikanan budidaya 557,79 ton/Tahun dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi yang tersedia untuk perikanan budidaya  $\pm 12.257,58$  Ha dan perikanan tangkap di WPS 572 sebesar  $\pm 565.300$  ton/tahun.

## 2. Jumlah Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan

Jumlah rumah tangga nelayan Kabupaten Tapanuli Tengah sampai Tahun 2018 sebanyak 35.047 orang, petani/pembudidaya ikan sebanyak 404 orang, sedangkan jumlah kapal penangkap ikan tahun 2018 menurut jenis kapal sebanyak 2.279 unit dengan perincian sebagai berikut: perahu tanpa motor sebanyak 210 unit, perahun motor dan motor temple sebanyak 810 unit dan kapal motor 1.259 unit.

Secara umum jenis ikan hasil tangkapan oleh kapal motor nelayan di Tapanuli Tengah terutama untuk jenis ikan pelagis besar seperti Tuna Mata Besar dan ikan Cakalang, pelagis kecil seperti Ikan Kembung, Ikan Tembang, Ikan Kuwe, Teri serta ikan-ikan penghuni terumbu karang dari spesies kerapu dan kakap.

## 3. Sarana dan Prasarana Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Fasilitas penunjang perikanan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

- a. PPN Sibolga
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan Angin
- c. Industri Pengolahan Ikan
- d. Balai Benih Ikan (BBI) sibabangun
- e. Unit Pembudidaya Rakyat (UPR)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pabrik es dan *Cold Storage*

## B. Gambaran Umum Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Desa Hajoran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mayoritas penduduknya bertempat tinggal di pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayan.

Desa Hajoran merupakan salah satu desa yang terkenal di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pengolahan ikan hasil tangkapan yang cukup banyak. Desa Hajoran pada mulanya tidak begitu terkenal di Tapanuli Tengah karena belum terdapat kehidupan dan juga masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut masih sedikit. Namun, memasuki tahun 1971 sejak kedatangan Etnis Bugis perlahan-lahan Desa Hajoran sudah mulai memiliki kehidupan.

Tahun 1982 Etnis Bugis dan di susul etnis lainnya mulai datang dan menetap di Desa Hajoran. Beragam jenis asal-usul mereka yang berpindah dari berbagai daerah. Ciri khas profesi dari Desa Hajoran adalah masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Etnis asli dari Desa Hajoran menggunakan perahu dayung, namun sejak Etnis Bugis datang maka etnis lainnya mengikuti jejak dari bugis untuk menggunakan alat tangkap seperti Bagan Pancang atau yang disebut sekarang ini dengan Bagan Tancap.

Tahun 1982 Etnis Bugis dan di susul etnis lainnya mulai datang dan menetap di Desa Hajoran. Beragam jenis asal-usul mereka yang berpindah dari berbagai daerah. Ciri khas profesi dari Desa Hajoran adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Etnis asli dari Desa Hajoran menggunakan perahu dayung, namun sejak Etnis Bugis datang maka etnis lainnya mengikuti jejak dari bugis untuk menggunakan alat tangkap seperti Bagan Tancap.<sup>28</sup>

Pada tahun 1983 masyarakat nelayan Desa Hajoran mulai mengolah hasil tangkapan mereka dan mengirim olahan mereka ke luar desa maupun kota. Dari hasil tangkapan masyarakat nelayan inilah yang membuat perekonomian mereka semakin meningkat. Dengan mulai di buatnya bagan pancang, para masyarakat nelayan mulai menangkap ikan dengan menggunakan cara kerja berkelompok ataupun sendiri. Selain bagan tancap, bagan bot juga di gunakan para masyarakat pendatang. Bagan bot ini di perkenalkan ke Desa Hajoran sekitar tahun 1982 yang di bawa oleh orang pendatang yang berasal dari Batahan, Mandailing Natal.

Kedatangan bagan pancang dan bagan bot inilah yang sangat mendukung oleh para masyarakat nelayan dalam perekonomian mereka. Sehingga menyusullah masyarakat nelayan lainnya mempunyai bagan bot dan bagan pancang. Namun, disini dapat di lihat bahwa yang paling identik tauke pada Desa Hajoran ini bukanlah masyarakat asli Desa Hajoran, melainkan orang pendatang yang menetap di desa tersebut.

Banyak nya orang yang berdatangan dan menetap ke Desa Hajoran sangat membawa keuntungan besar bagi masyarakat sekitar. Sehingga perekonomian para masyarakat nelayan desa tidak dapat di katakan kurang

<sup>28</sup> Ratu Langit, Tokoh Masyarakat Desa Hajoran, (wawancara), 14 Maret 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu karena banyak nya sumber daya alam yang masih melimpah di desa ini.

Tahun 1984 kehidupan masyarakat nelayan semakin meningkat. Para masyarakat nelayan di desa mulai membeli kebun, tanah dan membangun rumah di pinggir pantai. Selain membeli kebun, tanah dan membangun rumah, masyarakat nelayan sudah mempunyai harta benda seperti memiliki sepeda motor bahkan setiap terang bulan, istri dari nelayan juga selalu membeli emas ke Toko Roma yang berada di Sibolga. Di samping itu, para anak-anak dari masyarakat nelayan sudah mulai bersekolah dan mengenal pendidikan.

Memasuki tahun 1990 dengan seiring berjalannya waktu desa ini semakin terkenal dari hasil tangkapan dan olahan mereka. Sehingga pada tahun inilah desa tersebut di juluki sebagai “Desa Dollar”. Julukan ini di berikan oleh orang-orang yang berdatangan ke desa untuk membeli hasil tangkapan dan olahan mereka. Pada tahun 1990 memang perekonomian di Desa Hajoran sangat meningkat secara drastis.<sup>29</sup>

Selain dari hasil tangkapan, olahan ikan yang mereka olah pun semakin banyak permintaan dari para konsumen. Sehingga putaran uang di tahun tersebut tidak pernah berhenti dalam sehari. Dalam sehari mereka para tauke yang rata-rata mempunyai langganan tetap mendapatkan keuntungan sebanyak ± Rp 5.000.000/ hari nya. Sehingga para anggota tauke

<sup>29</sup>Ibnu Hajar Hasibuan, Toko Masyarakat Desa Hajoran, (wawancara), 12 April 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan bagian ataupun gaji dengan membawa hasil ke rumah sebanyak  $\pm$  Rp 200.000/ hari.

Adapun hasil tangkapan olahan yang banyak di minta para konsumen adalah ikan asin dan ikan teri. Olahan hasil tangkapan masyarakat nelayan ini di kirim ke luar kota seperti Jambi, Palembang, Medan, Jawa, Padang, Taurutung, dan lain sebagainya.

### C. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari beberapa sektor potensi dan peluang investasi yang besar di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berada di pesisir Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dengan panjang garis pantai  $\pm$  200 km dan memiliki pulau – pulau kecil serta wilayahnya langsung menghadap ke Samudera Indonesia. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu SKPD yang berperan untuk Pencapaian Masyarakat Pesisir untuk Maju, Sejahtera dan Bermartabat di bidang Sektor Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah. Peran sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah sehingga pembangunan bidang kelautan dan perikanan harus tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Terwujudnya Masyarakat Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera “Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Visi dan Misi yang tertuang dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana Strategis untuk Mewujudkan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera” Dalam mewujudkan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **1. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan. Pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),
- c. Pelaksanaan evaluasi, administrasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Visi dan Misi Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah

### Visi :

Muwujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang mandiri, terpadu, berkelanjutan dan berdayasaing menuju masyarakat yang sejahtera.

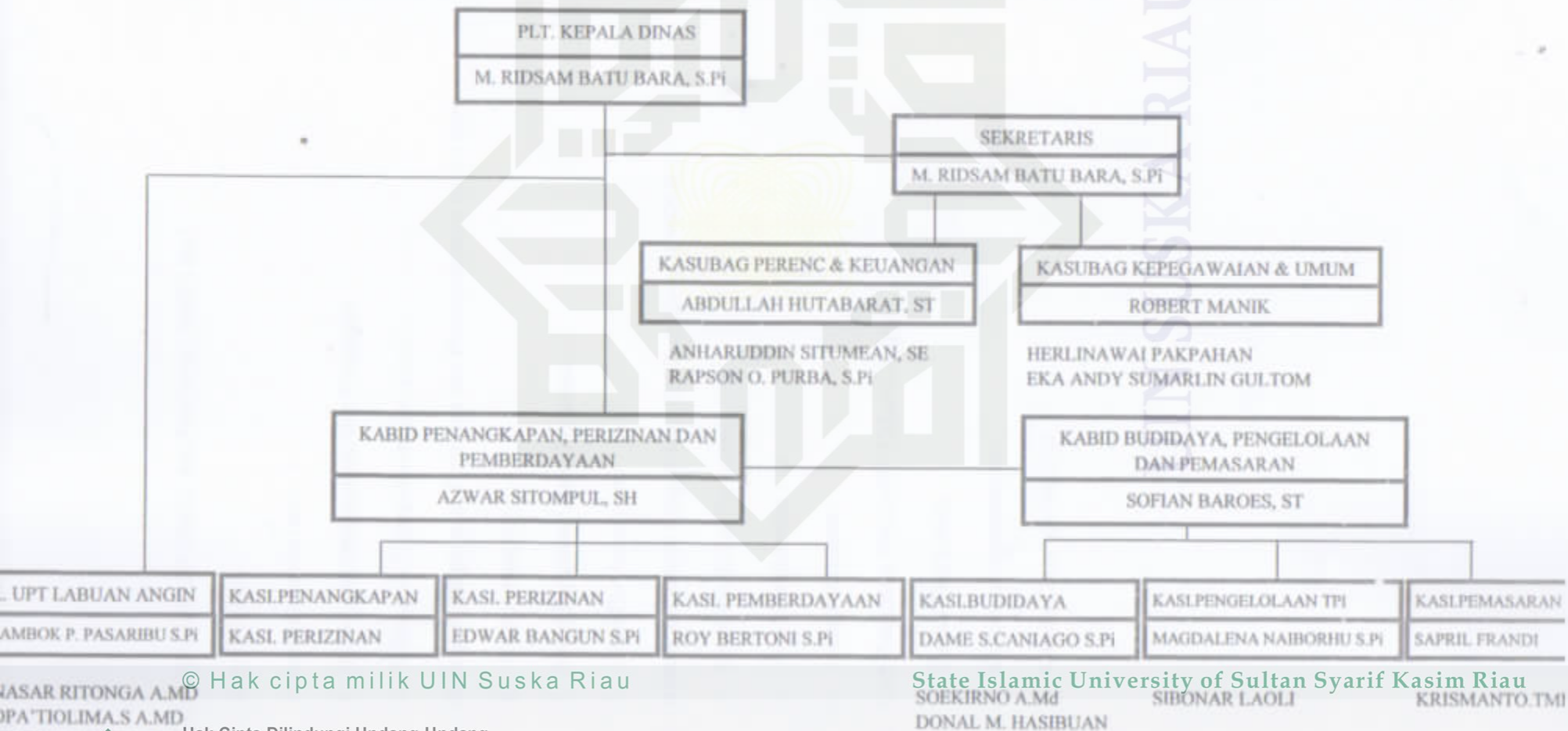
### Misi:

1. Meningkatkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan
3. Memfasilitasi jasmani keselamatan jiwa nelayan perikanan
4. Peningkatan produksi ikan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumen

## 3. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SOEKIRNO A.Md  
DONAL M. HASIBUAN

SIBONAR LAOLI

KRISMANTO.TMI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan. terdiri dari:
  1. Seksi Penangkapan
  2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan
  3. Seksi Pemberdayaan.
- d. Bidang Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran. terdiri dari:
  1. Seksi Budidaya Perikanan
  2. Seksi Pengelolaan TPI
  3. Seksi Pemasaran.
- e. Unit Pelaksana Teknis PPI Labuan Angin.
  1. Kasub Tata Usaha
  2. Kaseksi pengembangan
  3. Kaseksi Tata operasional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Permasalahan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial mental dan segi kehidupan spiritual. Maksud dengan kesejahteraan sosial ini adalah suatu ilmu yang mengembangkan taraf hidup terhadap komunitas nelayan untuk melakukan suatu kegiatan dalam mencapai tingkat kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Midgley Kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua seluas apa kebutuhan-kebutuhan

<sup>30</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Pembangunan Sosial dan Intervensi Komunitas*. (Jakarta: FEUI, 2003), h. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di penuhi dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Selanjutnya ada juga yang mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu usaha. Sebagaimana oleh Remansyhyn mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup penyediaan pertolongan yang proses-proses yang secara langsung berkenaan bagi penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan kualitas hidup. Itu meliputi pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan juga memperkuat dan atau memperbaiki lembaga-lembaga sosial.<sup>31</sup>

Dari pernyataan ahli dan kutipan di atas, maka kesejahteraan sosial nelayan Desa Hajoran jelas belum seimbang sesuai dengan perbedaan antara pemilik modal besar yang menggunakan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dengan nelayan tradisional yang hanya menggunakan alat tangkap sederhana, namun tidak merusak ekosistem laut.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomo 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Tangkap ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ini sangat membantu

<sup>31</sup> Muhadjir Effendy, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Malang: UMM press, 2007), h. 37



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam meningkatkan penjagaan terhadap ekosistem laut. Sesuai dengan kuitipan di atas gejala yang tidak sesuai norma dan nilai standar sosial diharapkan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah agar nelayan tradisional tidak terpinggirkan dan penyetaraan alat tangkap yang sederhana dan tidak mengganggu ekosistem kelautan bisa di canangkan kepada seluruh para pengusaha kapal jenis pukat hela (*trawls*) ini untuk tidak menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawls*) ini lagi agar terjaganya kesejahteraan sosial nelayan kedepannya dan menjadi lebih baik.

**B. Pengawasan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepihak yang dibawahnya.

Lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Pengawasan menurut Siagian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yusdisia, 2016), h. 13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan sebelumnya.<sup>33</sup> Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Pengertian dari pengawasan menurut Suyanto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sujanto ingin mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasar dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”. Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Kata yang semestinya dalam pengertian diatas adalah tolak ukur yang mengandung tiga segi, yaitu: sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).<sup>34</sup>

Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung “terhadap pekerjaan” dan “hasil kerja” bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam perkataan “terhadap pekerjaan” termasuk juga prosesnya

<sup>33</sup> S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta:Gunung Agung, 1986), h. 112

<sup>34</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih, *Op. Cit*, h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyentuh tidak sekedar pada ketepatan cara bekerja, tetapi juga berkenaan dengan aspek disiplin, ketekunan dedikasi, loyalitas, inisiatif dan kreatifitas dalam bekerja.<sup>35</sup>

Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan dan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Begitu pula fungsi pengorganisasian dan pegerakan sebagai unsur manajemen, maka pengawasan berusaha meluruskan dan mengkoreksi segala aktifitas-aktifitas dilapangan supaya benar-benar mengarah pada usaha tercapainya tujuan yang diinginkan.

Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan

<sup>35</sup> Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Sebuah pengawasan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh sebuah organisasi maka pengawasan tersebut akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi organisasi. Menurut Sondang P. Siagian manfaat dari pengawasan ialah:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Memberikan pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Tujuan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah yaitu kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu dapat terlaksana.<sup>36</sup>

### Macam-Macam Pengawasan

#### a) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula

<sup>36</sup> Jum Angraini, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta:Tama Jagakarsa, 2011), h.60

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>37</sup>

#### b) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

#### c) Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/ kesalahan dalam pelaksanaan.

#### d) Pengawasan Represif<sup>38</sup>

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

<sup>37</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 62

<sup>38</sup> Ibid, h. 64

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Pengertian Peranan

Dalam setiap masyarakat dikenal adanya status atau kedudukan dan peranan (*role*). Suatu status atau kedudukan merupakan suatu posisi dalam sistem sosial, dengan demikian peranan adalah pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Misalnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan suatu status, sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah peranan. Dan peranan juga dikatakan konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat juga dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>40</sup>

Menurut Sukanto menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h.54

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.243

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian peraturan yang membimbing dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.<sup>41</sup>

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Atau peranan dapat dikatakan juga seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>42</sup>

Sedangkan konsep tentang Peranan (*rule*) menurut Komaruddin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen;
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

<sup>41</sup> *Ibid*, h.244,

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), h.667

<sup>43</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta:Bumi Aksara,1994), h.768



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan-hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.<sup>44</sup>

Sedangkan unsur-unsur pokok dari suatu peranan adalah, sebagai berikut:

1. Peranan yang diharapkan dari masyarakat;
2. Peranan sebagaimana dianggap oleh masing-masing individu;
3. Peranan yang dijalankan didalam kenyataan.

Adapun maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, menyatakan bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, maka Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat besar dalam melaksanakan kontrol terhadap alat tangkap ikan jenis pukot hela (*trawls*) ini agar nelayan tradisional yang ada di desa hajoran khususnya dapat hidup dengan aman dan tentram tanpa adanya gangguan dari

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, h.55

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapal-kapal yang dapat merusak ekosistem laut yang berdampak kepada berkurangnya hasil tangkapan nelayan.

### D. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan menegahkannya sebagai penjabaran nilai untuk mempertahankan kedamaian dalam hidup.<sup>45</sup> Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif.<sup>46</sup> Namun demikian, terminology penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana.<sup>47</sup>

Lawrence M. Friedman<sup>48</sup> mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:

#### a) Substansi hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki

<sup>45</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.5

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 429

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), h.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

#### b) Struktur hukum (*structur of the law*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Ketika berbicara mengenai struktur hukum tidak terlepas dari institusi-institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau peranannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak dapat ditegakkan bila tidak ada aparat hukum yang berkredibilitas, kompeten, dan independen.

#### c) Budaya hukum (*legal culture*)

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain beberapa elemen di atas soejono soekanto juga menambah bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, diantaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana pendukung
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan aspek-aspek tersebut secara stimulan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat terwujud secara nyata.

**E. Kapal Pukat Hela (*trawls*)**

Pukat Hela (*trawls*) merupakan alat tangkap untuk menangkap ikan yang berada di dasar perairan, dengan hal tersebut pengoperasian pukat hela (*trawls*) akan mengeruk dasar perairan. terumbu karang yang terdapat pada dasar perairan tidak menutup kemungkinan akan terkeruk juga oleh alat tangkap pukat hela ini. Rusaknya terumbu karang akan mengganggu ekosistem bawah laut. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat makan bagi ikan, tempat memijah (memisahkan), tempat asuhan, tempat berlindung dan menempelnya rumput laut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Merupakan wilayah pengellaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Dalam pasal 3 Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia bahwa, jalur penangkapan ikan di WPPNRI terdiri dari: jalur penangkapan ikan I, jalur penangkapan ikan II, dan jalur penangkapan Ikan III.

Untuk jalur penangkapan ikan I itu terdiri dari jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

Untuk jalur penangkapan ikan II itu meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

Untuk jalur penangkapan ikan III itu meliputi ZEE dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II.

## 2. Alat Penangkap Ikan (API)

API merupakan sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Adapun alat-alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di Indonesia adalah terdapat pada pasal 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 2 bahwa API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, terdiri dari:

- a. pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar;
- b. pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan
- c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami.

### 3. Alat Bantu Penangkap Ikan (ABPI)

ABPI merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. ABPI ini ada 2 jenis yaitu rumpon dan lampu.

- a. Runpon merupakan alat bantu mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Rumpon terbagi menjadi 2 yaitu rumpon hanyut dan rumpon menetap, yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana dalam rumpon menetap ini ada yang di permukaan laut dan ada yang didasar laut.

- b. Lampu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Lampu terbagi menjadi 2 yaitu lampu listrik dan non listrik.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kontrol Yang Dilakukan Oleh DKP Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Di Desa Hajoran masih belum maksimal di lapangan hal itu di tunjukkan karena nelayan tradisional yang ada di Desa Hajoran Kabupaten Tapanuli Tengah masih banyak mengeluhkan tentang kapal pukat hela yang masih beroperasi di wilayah tempat nelayan tradisional sering menangkap ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan mungkin harus lebih tegas dan bersungguh-sungguh untuk memberantas kapal pukat hela (*trawls*) ini agar masyarakat nelayan tradisional yang ada di Desa Hajoran khususnya dapat hidup sejahtera dan pendapatan atau hasil tangkapan laut mereka kembali stabil seperti sebelum adanya kapal pukat hela (*trawls*) yang beroperasi di perairan Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Dalam penjelasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa penegakan hukum terhadap kapal pukat hela (*trawls*) ini juga sudah dilaksanakan dengan baik, sudah banyak juga kapal yang tertangkap saat melakukan operasi panangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun dalam penjelasan yang diberikan oleh nelayan tradisional Desa Hajoran bahwa sampai sekarang ini kapal pukat hela (*trawls*) masih banyak yang beroperasi secara normal. Mereka beroperasi secara bersembunyi-sembunyi dari aparat yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang berpatroli. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 ini dengan baik. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan harus lebih tegas dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pemberantasan terhadap kapal pukat hela (*trawls*) ini agar nelayan tradisional yang ada di Desa Hajoran dapat hidup aman dan hasil tangkapnya kembali normal seperti biasanya.

3. Dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukannya pemberantasan terhadap kapal pukat hela (*trawls*) bagi nelayan tradisional yang ada di Desa Hajoran itu adalah pertama, mengurangi hasil pendapatan bagi nelayan tradisional. Beroperasinya kapal pukat hela (*trawls*) ini memberikan kerugian bagi nelayan tradisional karena kapal pukat hela (*trawls*) ini beroperasi di wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan berkurang kemudian merusak terumbu karang tempat biota laut tinggal. Kedua, tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Karena dengan adanya kapal pukat hela (*trawl*) ini membuat masyarakat tidak aman dan resah dalam mencari rezekinya. Kemudian memberikan kerugian bagi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nelayan tradisional, sehingga nelayan tradisional jauh dari kata sejahtera.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, hendaknya selalu tegas dan keras terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal pukat hela (*trawls*) ini, karena kegiatan yang mereka lakukan itu sangat banyak menimbulkan kerugian. Sangat disayangkan jika perairan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah ini tercemar akibat aktivitas yang dilakukan oleh kapal pukat hela (*trawls*) ini. Oleh karena itu DKP dari pihak pemerintah harus bekerja keras lagi agar tercapainya kesejahteraan bagi nelayan tradisional dan terjaganya ekosistem bawah laut yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 merupakan suatu aturan yang harus dijalankan terutama terhadap kapal pukat hela (*trawls*) yang telah dilarang beroperasi di wilayah perairan Indonesia terutama pada perairan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dinas Kelautan dan Perikanan dari pihak pemerintah diharapkan dapat melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 71 tahun 2016 ini dengan sungguh-sungguh dan tegas agar dapat terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional yang merasa resah dan terganggu dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehadiran kapal pukat hela (*trawls*) ini yang membawa dampak negatif terhadap perekonomian nelayan tradisional.

3. Kepada nelayan tradisional jika mendapati adanya operasi yang dilakukan oleh kapal pukat hela (*trawls*) ini segera memberitahu polisi terdekat agar polisi dapat mengkonfirmasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan operasi penangkapan. Sehingga masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama dalam pemberantasan kapal pukat hela (*trawls*). Jika pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik dan bersungguh-sungguh maka masalah mengenai kapal pukat hela (*trawls*) ini dapat diselesaikan dengan cepat dan memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan tradisional.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika, 2012
- Aslim Arsyad, *Metode ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press, 2005
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yusdisia, 2016
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- H.M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif “Kominikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya”*, Jakarta: Kencana, 2011, Ed. Ke-2, Cet. Ke-6
- H. Sudirman dan Achmar Mallawa, *Tehnik Penangkapan Ikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1992
- Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Pembangunan Sosial dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: FEUI, 2003
- Jum Angraini, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Tama Jagakarsa, 2011
- Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya -Ed. Revisi-6*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muhadjir Effendy, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Malang: UMM press, 2007
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Proposal Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bantuan Alat Tangkap Bubu/Lukah TA. 2020
- R. Soerroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, Ed.1. Cet.13
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantatif dan kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta , 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, Cet. Ke-12
- S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta:Gunung Agung, 1986
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,2011

**B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 31
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

**C. Web**

Permen Kelautan dan Perikanan nomor PER.06/MEN/2008 dan bentuk baku konstruksi pukat hela arad SNI-01-7233-2006 BSN.-<http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/09/>



# PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperdanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Scrips dan judul, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap  
can Jenis (trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di  
esa Kabupaten Tapanuli Tengah" yang ditulis oleh :

: AUFIQ IKHTIAR HAREFA  
: 527100032  
: Menu Hukum

elah diumumkan pada :  
: enin, 28 Oktober 2019  
: m, 13.30 WIB  
: Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019  
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Handwritten signatures and stamps, including a large blue signature and a red stamp.

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM  
NIP. 19680226 199103 2 002



Pekanbaru, 14 Mei 2019

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

:TAUFIQ IKHTIAR HAREFA

:11527100032

:Ilmu Hukum S1

:VIII (Delapan)

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. PSDKP Kab. Tapanuli Tengah

Demikian akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Kontrol oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Ta

Plaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jenderal Sudirman No. 480 Telp. (0781) 39119 Fax. (0781) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22746  
TENTANG



032010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca dan memeriksa dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : PP.00.922/5/09 Tanggal 14 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : TAUFIQ IKHTIAR HAREFA

2. NIM : 11527100032

3. Program Studi : ILMU HUKUM

4. Jenjang : S1

5. Alamat : JL. GARUDA SAKTI GG. TRAVO KM. 1

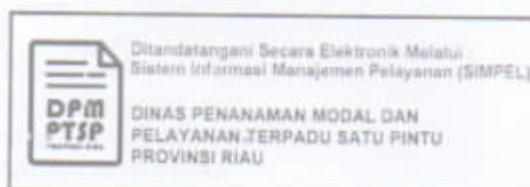
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN KONTROL OLEH DKP TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN JENIS PUKAT HELA (TRAWLS) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DESA HAJORAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

7. Lokasi Penelitian : 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Mei 2019



Salinan Kepada Yth :  
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
2. Gubernur Sumatera Utara  
3. Gubernur Kepulauan Riau di Medan  
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
5. Bersangkutan

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, baik berbentuk著作權 (copyright) maupun hak cipta lainnya, tanpa izin dari the National Library (Indonesian National Library) or the National Archives (National Archives and Library Service of the United States of America).
2. Dilarang mengumumkan dan menyalin ulang karya atau hasil penelitian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari the National Library (Indonesian National Library) or the National Archives (National Archives and Library Service of the United States of America).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : 070-1276 /BKB.P

Pratunuk Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi  
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi  
Sumatera Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor :  
DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22746 Tanggal 14 Mei 2019 Perihal Rekomendasi penelitian.

a. Nama	:	Taufiq Ikhtiar Harefa
b. Alamat	:	Jl. Garuda Sakti Gg. Travo KM.1
c. Pekerjaan	:	Mahasiswa
d. Nip/Idn/KTP	:	11527100032
e. Judul	:	Pelaksanaan Kontrol Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan ikan dan Penempatan Alat Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
f. Lokasi/Daerah	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
g. Lamanya	:	3 (tiga) bulan
h. Peserta	:	Sendiri
i. Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

State Islamic University

Medan, 17 Juli 2019

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL



BUDIANTO TAMBUNAN, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640526 199803 1 002

Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan)  
Tapanuli Tengah Up Ka Bakti Kesbangpol  
itbang Provsu  
Fakultasi Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
gal





## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Berusaha Tanggung di bawah ini:

Nama M. Ridsam Batubara, S.PI

Jabatan Pt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Alamat Jalan Ferdinand Lumbantobing, Pandan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Taufiq Ikhtiar Harefa

Nim 11527100032

Fak/Jur Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

dalam telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Kontrol Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Desa Hajeran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah" sejak 11 Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019 dan pula telah membahas materi penelitiannya dengan kami

UIN SUSKA RIAU

Pandan, 5 Agustus 2019

M. RIDSAM BATUBARA, S.PI

NIP. 19710404 199703 1 004

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6203/2019

Surat Keterangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini

Nama : TAUFIQ IKHTIAR HAREFA  
NIM : 11527100032  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 28 MEI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 1 Agustus 2019

Dekan,

DR. Drs. H. Hajar, M.Ag 34  
NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Surat Keterangan ini menerangkan bahwa:

**AUFIQ IKHTIAR HAREFA**

1527100032

ILMU HUKUM

**PELAJARIAN PENGAWASAN OLEH DKP TERHADAP ALAT**

**TANGKAP IKAN JENIS PUKAT HELA (TRAWLS)**

**BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN**

**PERIKANAN DI DESA HAJORAN KECAMATAN PANDAN**

**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**RONI KURNIAWAN, SH., MH**

Surat Keterangan ini telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah

ditetapkan.

Pekanbaru, 12 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## RIWWAYAT HIDUP PENULIS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Auful Ikhtiar Harefa lahir di Sibolga pada tanggal 12 Desember 1997. Anak pertama dari Bapak Datar Haklan Harefa dan Salmaidar Br. Sitanggang. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 58309 Pandan 3 di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Pandan Nauli di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2012 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum dengan Nim 11527100032.

Selain kuliah penulis lebih suka berkecimpung di dunia non organisasi. Karena penulis tidak tertarik untuk berkecimpung di dunia organisasi. Penulis melihat bahwa saat ini organisasi sebagai sebuah lembaga dimana kita itu berpeluang besar melakukan hal-hal yang bersifat persaingan dan mengambil hal-hal yang menguntungkan bagi pribadi bukan bagi organisasi, hanya mendewasakan ego dan membuang waktu yang seharusnya bias kita manfaatkan untuk menyelesaikan program SI.

Penulis melakukan magang di kantor Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Riau kota Pekanbaru dan banyak mendapatkan pengalaman di bidang hukum. Kemudian penulis melakukan kegiatan Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dkp Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Paku Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang munaqosah pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,24.